

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU  
PRAKERJA PADA MASYARAKAT KABUPATEN  
PASAMAN**

*Diajukan Untuk Mendapat Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



*Oleh :*

**NURUL IZZAH**

**BP. 1810832041**

Pembimbing:

1. Dr. Tengku Rika Valentina, MA

2. Drs. Tamrin, M.Si

**JURUSAN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG  
2022**

## ABSTRAK

Program Kartu Prakerja bertujuan mengembangkan kompetensi kerja dan meningkatkan daya saing angkatan kerja. Sudah 37 gelombang yang telah dilaksanakan. Namun dibalik keberhasilan tersebut terdapat permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu *pertama*, terlihat ketidakseriusan masyarakat dalam menjalankan program kartu prakerja. *Kedua* kehadiran joki prakerja. Dalam hal ini joki diberi upah untuk menyelesaikan semua urusan mulai dari pendaftaran sampai mengikuti pelatihan yang diberikan. Secara tidak langsung hal ini akan menjauhkan esensi tujuan dari diselenggarakannya Program Kartu Prakerja. Peneliti berasumsi fenomena tersebut terjadi karena pemerintah sebagai pembuat kebijakan kurang mendalami kondisi sosial penerima kebijakan, karena jika dilihat dari kondisi sosialnya, mata pencaharian masyarakat Nagari Ganggo Hilia adalah petani. Sebagian besar tidak menempuh pendidikan yang tinggi sehingga banyak yang gagap teknologi. Melalui Metode Penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle yang mana terdapat 2 variabel besar yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yakni variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan kebijakan. Hasil penelitian ini adalah jika dilihat dari variabel konten secara umum letak kebijakan program Kartu Prakerja belum tepat jika di terapkan pada masyarakat Nagari Ganggo Hilia yang mengandalkan teknologi, namun dari segi ekonomi sudah tepat, pada indikator implementor kebijakan, implementor kebijakan sudah ada sampai tingkat kabupaten namun tidak sampai kepada tingkatan paling rendah. Dari segi sumber daya yang digunakan implementor tidak memadai karena sangat terbatas dari segi perangkat dan jaringan. Selanjutnya dari segi variabel konten, terlihat bahwa tingkat kepatuhan penerima manfaat program kartu prakerja di Nagari Ganggo hilia masih kurang, hal tersebut terjadi karena mayoritas penerima manfaat program Kartu Prakerja menggunakan jasa joki sehingga memang tidak tergambar adanya keseriusan dari peserta dalam menjalankan program. Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta program hanya membutuhkan insentif semata.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program Kartu Prakerja, Joki

## **ABSTRACT**

*The Pre-Employment Card Program aims to develop work competencies and increase the competitiveness of the workforce. Now 37 waves have been implemented. However, behind this success, there are problems that occur in the field, namely first, it is seen that the community is not serious in carrying out the pre-employment card program. Second, the presence of pre-employment jockeys. In this case, the jockeys are paid to complete all matters from registration to participating in the training provided. Indirectly this will take away the essence of the purpose of holding the Pre-Employment Card Program. Researchers assume that this phenomenon occurs because the government as a policy maker does not understand the social conditions of policy recipients, because when viewed from the social conditions, the livelihoods of the Nagari Ganggo Hilia community are farmers. Most of them do not have a higher education, so many are technologically savvy. Through qualitative research methods. This study uses the implementation theory proposed by Merilee S. Grindle in which there are 2 major variables that influence the success of policy implementation, namely the policy content variable and the policy environment variable. The results of this study are that when viewed from the content variables, in general the location of the pre-employment card program policy is not appropriate if applied to the Nagari Ganggo Hilia community who relies on technology, but from an economic point of view it is correct, on policy implementor indicators, policy implementors already exist at the district level but not to the lowest level. In terms of the resources used by the implementor, it is inadequate because it is very limited in terms of devices and networks. Furthermore, in terms of content variables, it can be seen that the level of compliance of the beneficiaries of the pre-employment card program in Nagari Ganggo hilia is still lacking. This is because the majority of the beneficiaries of the pre-employment card program use the services of jockeys, so it does not show the seriousness of the participants in running the program. Overall, it can be concluded that program participants only need incentives*

**Keywords:** *Implementation, Pre-Employment Card Program, Jockey*